

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Telah banyak dilakukan penelitian diseluruh dunia mengenai bagaimana keefektivitas komite audit. Sebagian besar penelitian terdahulu memberikan hasil bahwa adanya keterkaitan antara karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dengan kualitas laba perusahaan.

Park (2019:1) melakukan penelitian dengan judul kompensasi komite audit, praktik terbaik dan biaya audit, tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana kompensasi untuk komite Audit mempengaruhi biaya Audit, dan bagaimana asosiasi dimoderasi oleh kepatuhan dengan praktik terbaik untuk menangkap pemantauan yang efektif. Regresi merupakan model yang diperkirakan digunakan untuk memverifikasi bagaimana hubungan antara kompensasi komite Audit dan biaya Audit dimoderasi oleh kepatuhan komite Audit dengan praktik terbaik. Selain itu, model regresi logistik digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara kompensasi komite Audit dan pencapaian oportunistik tujuan laba dimoderasi oleh kepatuhan komite Audit dengan praktik terbaik. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara tingkat kompensasi yang diterima anggota komite Audit dan biaya Audit, yang diperkuat di perusahaan yang memiliki komite Audit yang mematuhi semua praktik terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite Audit yang dibayar tinggi melibatkan auditor berkualitas tinggi untuk melengkapi fungsi manajemen pemantauan dan kompensasi komite Audit dan kepatuhan dengan praktik terbaik saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas audit. Studi ini dengan demikian memberikan wawasan menarik yang dapat diterapkan ke negara-negara dengan persyaratan yang berkaitan dengan skema kompensasi untuk komite Audit atau pembentukan komite Audit.

Mohammed, *et al* (2013:50) melakukan penelitian dengan judul karakteristik komite audit dan kualitas penghasilan: bukti dari Yordania, tujuan makalah ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara karakteristik komite audit dan manajemen laba. Sampel dalam penelitian ini termasuk 50 perusahaan industri yang

terdaftar di Amman Stock Exchange ASE. Dua model digunakan untuk mengukur kualitas laba: satu yang tergantung pada kontinuitas pendapatan sebagai indikasi kualitas, dan satu yang tergantung pada penurunan akrual diskresioner kualitas, menggunakan persamaan regresi data gabungan untuk dua tes (*Ordinary Least Squares OLS dan Binary Logit*). Studi ini menemukan bahwa ada pengaruh beberapa karakteristik standar komite audit terhadap kualitas laba. Namun, dengan ukuran sampel yang kecil, kehati-hatian harus diterapkan, karena temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Penelitian ini telah memunculkan banyak pertanyaan yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, dan direkomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dalam bidang-bidang berikut: dampak karakteristik komite audit terhadap peningkatan konservatisme akuntansi; hubungan antara karakteristik komite audit dan kinerja perusahaan; dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendapatan perusahaan-perusahaan Yordania.

Hastuti, *et al* (2020:225) melakukan penelitian dengan judul Substitusi antara manajemen laba akrual dan riil: Peran komisaris independen dan komite audit, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki substitusi antara manajemen laba berbasis akrual dan manipulasi aktivitas nyata berdasarkan independensi dewan komisaris dan komite audit (jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit). Penelitian ini melibatkan sampel perusahaan manufaktur pada periode 2009-2014 dengan 664 pengamatan. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda dilakukan untuk mendapatkan beberapa bukti bahwa independensi dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba berbasis akrual tetapi berpengaruh negatif signifikan pada manipulasi kegiatan nyata, sejauh mendapatkan dampak yang lebih kuat setelah 2012. Jumlah anggota komite audit memiliki efek positif yang signifikan terhadap manajemen laba berbasis akrual dan efek negatif yang signifikan terhadap manipulasi aktivitas nyata melalui biaya produksi abnormal tanpa perbedaan antara pra dan pasca 2012. Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan berpengaruh pada manajemen laba berbasis akrual tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi manipulasi aktivitas nyata. Selain itu, substitusi dari manajemen laba berbasis akrual ke manipulasi aktivitas nyata terjadi karena adanya independensi dewan komisaris yang datang dengan dampak yang lebih kuat pada manipulasi aktivitas nyata setelah 2012. Selanjutnya,

terdapat substitusi dari berbasis akrual manajemen laba untuk manipulasi aktivitas nyata berdasarkan jumlah anggota komite audit tanpa efek yang berbeda sebelum dan sesudah 2012.

Haeridistia, *et al* (2019:24) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kemandirian, etika profesional & pengalaman auditor pada kualitas audit penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada auditor di publik kantor akuntan di DKI Jakarta. data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 127 responden. penelitian ini adalah penelitian kecelakaan, yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) pada variabel lain (variabel tak bebas). penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, etika profesi dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Lestari (2017:97) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba di BEI, yang bertujuan untuk menguji, menganalisis, dan menemukan bukti empirisme mempengaruhi efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit pada manajemen laba dengan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan leverage sebagai kontrol variabel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, efektivitas komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh pada manajemen laba. Selain itu, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan leverage berpengaruh pada manajemen laba. Kelemahan pada penelitian terdapat pada sampel ataupun sektor perusahaan, kurangnya variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba sehingga hasil yang didapatkan dapat bervariasi, Kurangnya pemahaman setiap aspek-aspek pertanyaan yang ada sehingga perbedaan persepsi penilaian dapat dikurangi, untuk menghasilkan data yang lebih valid.

Dwiharyadi (2017:75) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Komite Audit Dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah proporsi anggota komite audit dan anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan mengurangi terjadinya manajemen laba perusahaan. Pemisahan keahlian akuntansi dan keahlian keuangan dilakukan karena keahlian akuntansi diasumsikan lebih mampu mengatasi manajemen laba sementara keahlian keuangan lebih fokus pada pengelolaan keuangan dalam operasional perusahaan. Dengan menggunakan panel data, penelitian ini menemukan bahwa anggota komite audit dan anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian akuntansi atau keahlian keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, keberadaan kedua keahlian ini pada anggota dewan komisaris akan mengurangi manajemen laba perusahaan sementara tidak demikian dengan hasil pengujian pada anggota komite audit. Keunggulan dari penelitian ketika komite audit dengan keahlian akuntansi diinteraksikan dengan komite audit dengan keahlian keuangan, hasilnya justru menunjukkan pengaruh positif terhadap manajemen laba, penelitian ini juga berhasil memberikan bukti empiris bahwa keahlian keuangan baik yang dimiliki oleh komite audit maupun dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun kurangnya akses data untuk mendapatkan sampel yang lebih luas dan, kurangnya pertimbangan terhadap pengalaman pada komite audit maupun dewan komisaris.

Ichsany, *et al* (2018:34) melakukan penelitian dengan judul frekuensi pertemuan dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba dengan pendekatan non-discretionary accruals, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai adanya praktik manajemen laba dalam mekanisme corporate governance yang terdiri dari frekuensi pertemuan dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini menggunakan pengukuran manajemen laba dengan pendekatan non-discretionary accruals (NDA) yang diperkenalkan oleh Jones. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pada sub sektor konstruksi dan bangunan tahun 2010-2016. Teknik sampling menggunakan metode purposive. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu serta dilanjutkan dengan uji hipotesis. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Nasution (2013:429) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari salah satu komponen corporate governance terhadap manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Pemilihan komponen corporate governance ini digunakan sebagai evaluasi penerapan corporate governance setelah sebelumnya peraturan mengenai hal ini diperbarui dan diberlakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2006. Komponen tersebut adalah komite audit. Dalam studi ini menggunakan variable yang berkaitan dengan keberadaan dan peran komite audit di perusahaan perbankan Indonesia, diantaranya jumlah komite audit, keahlian keuangan komite audit, keahlian industry komite audit, frekuensi kegiatan komite audit, serta tingkat kehadiran rata-rata komite audit dalam rapat. Manajemen laba dihitung menggunakan model yang sesuai dengan aktivitas perbankan. Data perusahaan yang digunakan, diambil dari laporan keuangan perusahaan perbankan dengan periode pelaporan dari 2010 hingga 2011. Penelitian ini menggunakan metode statistik uji regresi berganda.. Dari hasil penelitian terungkap bahwa komite audit tidak mempengaruhi aktivitas manajemen laba di perusahaan perbankan meskipun dalam proses penunjukan dan dalam penugasan mereka. Kurangnya periode dalam pengambilan penelitian sehingga gejala manajemen laba dan peran komite audit kurang dirasakan.

Prabowo (2014:90) melakukan penelitian dengan judul pengaruh komisaris independen, indeendensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010 – 2012). Bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba yang diukur menggunakan *discretionary accruals*. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier

berganda dengan uji F, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel komisaris independen, independensi komite audit, ukuran, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial ukuran, dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Independensi

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens (2015:111), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Halim (2008) dalam Suputra (2013:43) independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Independensi menurut Wirakusumah, *et al* (2003) dalam Prasetyo (2019:85) merupakan pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi dan hasil-hasilnya, serta penerbitan laporan, merupakan alasan utama kepercayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Dalam kode etik akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan

tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dengan mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya.

Ruchjat Kosasih (2000) dalam Taman, *et al* (2018;77) ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu:

- 1) *Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien.
- 2) *Self review risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan.
- 3) *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
- 4) *Client influence risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien.

Rahayu (2009) dalam Rosyidah (2017;63) independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi Independence in fact dan independence in appearance. Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni; independence in fact (independensi dalam kenyataan) dan independence in appearance (independensi dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Agoes, *et al* (2009) dalam Burhanudin (2016;22) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor pemerintah adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor pemerintah.

Arens (2015:83) mengategorikan independensi kedalam dua aspek yaitu:

- 1) *Independensi in Fact* (Independensi dalam fakta),
Independensi dalam fakta (*independen in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
- 2) *Independensi in Appearance* (Independensi dalam penampilan)
Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara maupun keseluruhan.

2.2.1.1 Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Independensi

Menurut Aditama (2015:1169) faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor beberapa diantaranya adalah :

- 1) Hubungan keuangan dengan klien.
Dalam menjalankan pekerjaannya seorang audit apabila memiliki hubungan dengan keuangan dalam klien yang sedang di audit memberikan pengaruh yang besar terhadap kedua pihak di karenakan kemungkinan auditor memiliki sebagian saham pada perusahaan yang di tangani dengan demikian auditor dalam memberikan hasil memiliki beberapa manipulasi data sehingga tidak terjadi kerugian dan mana perusahaan tetap baik.
- 2) Kedudukan dalam perusahaan.
Memiliki kedudukan lebih dalam perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana terjadinya resiko manajemen laba, adanya beberapa pihak yang terkait dan ikut campur tangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai auditor dan seorang auditor

tidak ada pihak yang mengawasi apabila kedua kedudukan di miliki oleh satu orang saja.

3) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan klien.

Memiliki kerjasama dengan klien dalam hal lain juga dapat mempengaruhi bagai mana transparansi seorang auditor dalam menangani kasus yang sedang ia kerjakan, adanya ikatan bersama klien demi menjaga nama baik dan rasa tidak enakan kepada pihak klien menyebabkan mudah terjadinya resiko penyelewengan yang di lakukan auditor.

4) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit.

Adanya layanan jasa selain mengaudit yang mengakibatkan ketidak efisiensi dan efektif dalam pengerjaan tugas yang di lakukan auditor melibatkan dua pekerjaan yang berbeda dalam satu klien memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil dari salah satu jasa yang di lakukan berupa hasil dari auditor itu sendiri.

5) Hubungan keluarga dan pribadi.

Adanya keterkaitan yang di miliki seorang auditor dapat mempengaruhi bagaimana jalannya pengerjaan audit terhadap suatu perusahaan yang sedang auditor tersebut tangani, memiliki rasa segan dan ragu yang dapat merugikan perusahaan.

6) Imbalan atas jasa profesional.

Tanpa diragukan lagi banyak auditor mulai kekurangan sikap independensinya terhadap gaji yang di terima, memiliki pesaing yang banyak dalam mendapatkan penugasan pada klien yang memiliki *fee* yang tidak sedikit yang menyebabkan adanya sikut menyikut sesama auditor merupakan suatu tindak kurang terpuji yang bila terjadi dapat mencemari nama baik auditor dan nama baik profesi akuntan.

7) Penerimaan barang atau jasa dari klien.

Banyak klien yang memiliki trik kecil untuk berkerjasama dengan auditor yang sedang mengaudit perusahaannya, dengan berupa hadiah-hadiah kecil seperti uang bensin atau hal-hal kecil lainnya yang memberikan tekanan terhadap auditor agar memberikan kesan baik terhadap hasil dari laporan perusahaan klien, tidak sedikit pula beberapa auditor tetap memperhatikan prinsipnya sebagai seorang auditor yang jujur dan terbuka.

2.2.1.2. Gangguan Independensi

Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:

1) Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.

Gangguan pribadi meliputi antara lain:

- a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

2) Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi antara lain:

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit.
- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit.
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.

3) Gangguan Organisasi

Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

2.2.2. Komite Audit

Komite audit menurut komite nasional kebijakan governance (KNKG ,2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas- tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Pendapat Widyati (2013:242) mengatakan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Beasley (1996) dalam Hamdan (2017;73) penelitiannya yang menyatakan bahwa peluang penipuan dalam laporan keuangan semakin berkurang dengan adanya keberadaan auditor eksternal yang bukan anggota pemilik perusahaan.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 dengan adanya Keputusan Direksi BEJ No: Kep- 315/BEJ/06/2000 Paragraf 5. Perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada hal ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good CorporateGovernance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001 Paragraf 4, tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa:

- 1) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang.
- 2) Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan/atau keuangan. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang seharusnya dipenuhi. Komite audit hendaknya kompeten dalam menjalankan tugas dan perannya. Bapepam mensyaratkan bahwa minimal salah satu anggota komite audit haruslah memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan, atau mungkin menguasai bidang tersebut merupakan suatu karakteristik yang melambangkan kompetensi dari komite audit.

- 3) Seorang komisaris independen menjadi ketua.
- 4) Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.

Penelitian Defond, *et al* (2005) dalam Dwiharyadi (2017:78) menemukan bahwa penunjukan komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi menimbulkan dampak positif di pasar, dibandingkan penunjukan komite audit yang tidak memiliki keahlian dibidang akuntansi yang tidak mendapatkan respon. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan komite audit dengan latar belakang, atau mungkin pengalaman dibidang akuntansi, lebih memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan. (Mutmainnah, *et al*, 2013;170).

2.2.2.1. Tujuan Komite Audit

Tujuan dibentuknya komite audit menurut Komite Nasional (Good Corporate Governance 2002) mengenai pedoman pembentukan komite audit yang efektif adalah:

1) Pelaporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

2) Manajemen Risiko dan Kontrol

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3) *Corporate Governance*

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

2.2.2.2. Fungsi dan Peran Komite Audit

Prabowo (2014:92) Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya

tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta dilaksanakannya penerapan good corporate governance. Fungsi dan peran komite audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen. Menurut Bradbury, *et al* (2004) dalam Sukarno (2016;117), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

2.2.2.3. Tanggung Jawab dan Tugas Komite Audit

Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 Paragraf 4, pada tanggal 24 September 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yaitu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk memberikan pendapat mengenai kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

2.2.3. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi merupakan professional yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Tugiman, *et al* (2014:11) mengungkapkan bahwa, peningkatan kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya.

Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 mengenai kompetensi auditor bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.

Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas- tugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya.

2.2.4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan

dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Frekuensi pertemuan sebagai evaluasi audit due diligence komite. Frekuensi pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana, 2017:424).

Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.2.5. Manajemen Laba

Manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Scott (2015: 369) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. Scott (2015: 369) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu sebagai perilaku oportunistik manajer dan sebagai *efficient contracting (efficient earnings management)*. Manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer dilakukan untuk memaksimalkan utilitas perusahaan dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost (opportunistic earnings management)*. Manajemen laba dari *perspektif efficient contracting (efficient earnings management)* dapat dipahami sebagai cara untuk memberi manajer suatu fleksibilitas guna melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga.

Manajemen laba dapat dipahami sebagai perilaku mengubah, menyembunyikan, atau menunda informasi keuangan. Sulistyanto (2008) dalam Anggoro (2017;2) mengatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, manajemen laba dapat dipahami sebagai suatu perilaku curang dari manajer perusahaan. Kecurangan

dalam manajemen laba disebabkan oleh manipulasi terhadap angka-angka dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sadar agar stakeholder yang ingin mengetahui kondisi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Healy & Wahlen (1999) dalam Ghazali (2015;191) mendefinisikan manajemen laba sebagaimana kutipan berikut.

“when managers use judgment in financial-reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang berbeda kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara stakeholder dengan perusahaan. Manajemen laba pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut.

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan, definisi manajemen laba menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Definisi Sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Earning management dalam arti sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan besarnya laba.

2) Definisi Luas

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Berbagai definisi telah diberikan dalam menjelaskan manajemen laba sebagai suatu bentuk khusus akuntansi yang “dirancang”, dan bukannya akuntansi “berdasarkan prinsip”. Schipper (1989) dalam Febriyanti (2014:57) melihat

manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Hal ini diasumsikan dapat dilakukan melalui pemilihan metode-metode akuntansi dalam *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) ataupun dengan cara menerapkan metode yang telah ditentukan dengan cara tertentu.

Gumanti (2000) dalam Adhikara (2011:113) Ada tiga sasaran yang dicapai oleh manajer sehubungan dengan earnings management yaitu meminimalisasi biaya politis, maksimalisasi kesejahteraan manajer dan minimalisasi biaya finansial. Menurutny jelas hal ini menunjukkan bahwa sasaran dari earnings management adalah cukup komprehensif, yaitu mencakup banyak aspek dalam perusahaan baik demi kepentingan pribadi manajer maupun secara keseluruhan. Pengaturan laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan perilaku para manajer atau pihak manajemen perusahaan dalam proses pelaporan keuangan perusahaan yang mencerminkan hasil kinerja perusahaan dalam periode tertentu, yaitu kemungkinan adanya motivasi tertentu yang mendorong mereka mengatur laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian

Peran komite audit dalam menegakkan tata kelolah perusahaan semakin diperhatikan, terutama sejak maraknya kasus manipulasi terhadap laba yang dilakukan manajemen yang merupakan dampak dari lemahnya penerapan tata kelolah perusahaan. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah komite audit yang diasumsikan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Pemikiran dari Suaryana (2005) dalam Chrisdianto (2014:3) terkait peran komite audit dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji karakteristik komite audit apa saja yang berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga dapat meminimalkan manajemen laba tersebut.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Efektivitas komite audit telah menjadi daya tarik dari keterkaitan antara kualitas dari proses pelaporan keuangan suatu perusahaan dengan adanya beberapa skandal akuntansi akhir-akhir ini (Lin *et al.*, 2006) dalam (Amin, 2016:4) .

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari karakteristik komite audit terhadap manajemen laba.

Penelitian ini berfokus pada independensi, ukuran, kompetensi dan frekuensi pertemuan pada komite audit.

2.4.1. Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Syarat utama anggota komite audit adalah independensi komite audit. Independensi dibutuhkan guna menilai keefektifan auditor internal, menilai independensi dan obyektivitas auditor eksternal. Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Mulyadi (2014), independensi merupakan sikap bebas dari pengaruh-pengaruh orang lain maupun rasa ketergantungan terhadap pihak lain.

Ebrahim (2007) dalam Widiastuty (2016:35) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara keterjadian manajemen laba dengan komite audit yang terdiri dari anggota yang independen. Karena semakin independen anggota tersebut, dapat memberikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan lebih terpercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba.

Untuk menguji keterkaitan antara independensi komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, penelitian ini akan menguji H1 yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Independensi berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Panduan pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut komite nasional kebijakan governance (KNKG), untuk membentuk komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang dibutuhkan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen.

Yang and Krishnan, (2005) dalam Cinthya (2015;173) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang antara ukuran komite audit terhadap manajemen laba

(*discretionary accrual*). Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Tingginya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

Untuk menguji keterkaitan antara ukuran komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, penelitian ini menguji H2 yang dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4.3. Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki perihal pemahaman yang layak tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menggambarkan terdapatnya pencapaian dan proteksi suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit diwajibkan mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite (Anggarini, 2010) dalam (Purwanto, 2015:3). Untuk menguji keterkaitan antara kompetensi komite audit dan manajemen laba, penelitian ini menguji H3 yang dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Kompetensi berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4.4. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Terhadap Manajemen Laba

Independensi yang baik akan menjadi lengkap dan efektif didasari dengan dorongan keaktifan dari komite audit dalam melaksanakan pertemuan komite audit. Semakin tingginya frekuensi pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak melakukan penyelewengan menggunakan hak untuk kepentingan pribadi.

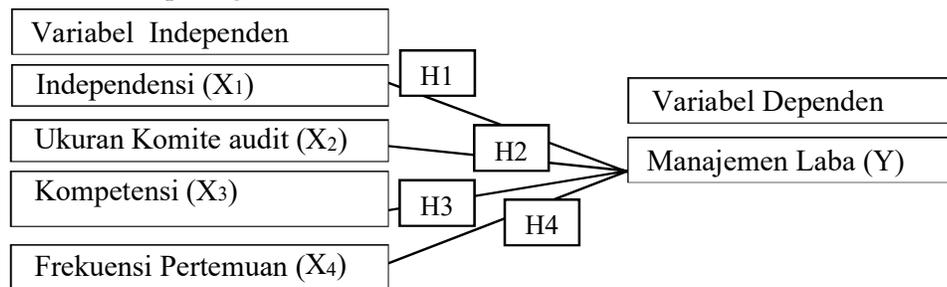
Sharma *et al.* (2009) dalam Effendi (2013:4) menyatakan bahwa perusahaan yang komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang terhitung kecil berakibat menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga jika semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat memperkecil tindakan manajemen laba. Untuk menguji keterkaitan antara frekuensi pertemuan audit dan

kualitas laba, penelitian ini menguji H4 yang dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Banyaknya kasus memanipulasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen memberikan perhatian khusus terhadap komite audit untuk memperketat dalam pengawasan tata kelola perusahaan. Karena komite audit sendiri dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Seperti pendapat yang disampaikan Suryana (2005) dalam Mustoffa (2016:13) yang menghubungkan peran komite audit dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dari penelitian ini peneliti membuat kerangka konsep penelitian menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang terdiri dari independensi, ukuran komite audit, kompetensi, dan frekuensi pertemuan terhadap manajemen laba. Konsep penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh independensi (X1), ukuran komite audit (X2), kompetensi (X3), dan frekuensi pertemuan (X4) terhadap manajemen laba (Y). Berikut kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat diilustrasikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- X : Variable Independen
- X₁ : **H1 : Independensi berpengaruh terhadap manajemen laba.**
- X₂ : **H2 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.**
- X₃ : **H3 : Kompetensi berpengaruh terhadap manajemen laba.**
- X₄ : **H4 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.**
- Y : Variable Dependen
- : Pengaruh Parsial